



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA-135.05-0/2026**



DS:0139-4961-8213-6723

**A. DASAR HUKUM :**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                |   |                                                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 135 KEMENTERIAN HUKUM                           |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 3. PAGU                        | : | Rp.597.744.303.000                              |
- (LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

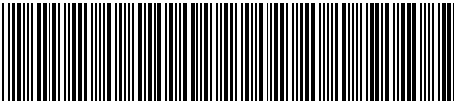
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN  
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

|                                                                                                         |   |                    |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA                                                                         | : | 135                | KEMENTERIAN HUKUM                        |
| 2. UNIT ORGANISASI                                                                                      | : | 05                 | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 3. PAGU                                                                                                 | : | Rp.597.744.303.000 |                                          |
| (LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH) |   |                    |                                          |

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

|                          |   |           |                                                                                                                                             |             |
|--------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. PROGRAM               | : | 135.05.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                                                       | 281.944.729 |
|                          |   | 135.05.WA | Program Dukungan Manajemen                                                                                                                  | 315.799.574 |
| 2. SASARAN STRATEGIS K/L | : | 01        | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                                                                         |             |
|                          | : | 02        | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi                                            |             |
| 3. FUNGSI                | : | 03        | KETERTIBAN DAN KEAMANAN                                                                                                                     | 597.744.303 |
| SUB FUNGSI               | : | 0303      | PEMBINAAN HUKUM                                                                                                                             | 597.744.303 |
| 4. PRIORITAS NASIONAL    | : | 07        | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | 4.530.814   |
| NON PRIORITAS NASIONAL   | : |           |                                                                                                                                             | 593.213.489 |



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                          | VOLUME / SATUAN | ALOKASI DANA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 135.05.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                                  |                 | 281.944.729  |
| SP03      | Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional                                          |                 |              |
| IKP01     | Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual                                                                | 3,06 Indeks     |              |
| SP04      | Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual                                |                 |              |
| IKP02     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI                                       | 3,36 Indeks     |              |
| SP06      | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual                                              |                 |              |
| IKP01     | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual                                                              | 2,4 Indeks      |              |
| 7115      | Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri                                                                   |                 | 14.619.677   |
| 01.01     | Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan | 85 Persentase   |              |
| 01.02     | Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait                                                     | 95 Persentase   |              |
| 01.03     | Tingkat validasi Sertifikat Hak Desain Industri                                                                        | 80 Persentase   |              |
| 01.04     | Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)                                                               | 75 Persentase   |              |
| 02.01     | Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta                                                                            | 20 Persentase   |              |
| 03.01     | Persentase Desain Industri Terdaftar                                                                                   | 75 Persentase   |              |
| 04.01     | Persentase Peningkatan Pencatatan KI Komunal                                                                           | 25 Persentase   |              |
| 05.01     | Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan Kinerja "Baik"                                                             | 90 Persentase   |              |
| 7116      | Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual                                             |                 | 39.162.380   |
| 01.01     | Indeks Pemanfaatan Kerja Sama dalam Pelindungan dan/ atau Pemanfaatan KI                                               | 3.10 Indeks     |              |
| 02.01     | Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual                                             | 2,4 Indeks      |              |
| 03.01     | Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"                                                                           | 80 Persentase   |              |
| 04.01     | Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total KI yang terdaftar/ tercatat                                             | 60 Persentase   |              |



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

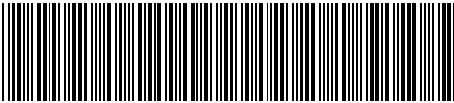
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

| KODE | PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                           | VOLUME / SATUAN |            | ALOKASI DANA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 7117 | Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis                                                                     |                 |            | 26.663.737   |
|      | 01.01 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan                                 | 90              | Persentase |              |
|      | 01.02 Tingkat Validasi Sertifikat Merek                                                                                 | 90              | Persentase |              |
|      | 01.03 Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis                                                                    | 92              | Persentase |              |
|      | 02.01 Persentase Merek Terdaftar                                                                                        | 71              | Persentase |              |
|      | 03.01 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar                                                                           | 53              | Persentase |              |
|      | 04.01 Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"                                                                  | 84              | Persentase |              |
| 7118 | Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang                                      |                 |            | 26.783.096   |
|      | 01.01 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan | 85              | Persentase |              |
|      | 01.02 Tingkat Validasi Sertifikat Paten                                                                                 | 92              | Persentase |              |
|      | 01.03 Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu                                                     | 92              | Persentase |              |
|      | 01.04 Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang                                                             | 92              | Persentase |              |
|      | 02.01 Persentase Paten yang diberi (granted)                                                                            | 36              | Persentase |              |
|      | 03.01 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar                                                       | 100             | Persentase |              |
|      | 04.01 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang                                                       | 10,5            | persentase |              |
| 7119 | Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual                                                                    |                 |            | 10.702.460   |
|      | 01.01 Persentase Wilayah yang Aman dari Pelanggaran Kekayaan Intelektual                                                | 76              | Persentase |              |
|      | 01.02 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Selesai Ditangani                                                | 60              | Persentase |              |
| 7120 | Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual                                                         |                 |            | 84.748.206   |
|      | 01.01 Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Kekayaan Intelektual              | 99              | Persentase |              |



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                          | VOLUME / SATUAN |            | ALOKASI DANA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 7121      | 01.02 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia | 99,00           | Persentase | 79.265.173   |
|           | 01.03 Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual                               | 1               | Jam        |              |
|           | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah                                                                 |                 |            |              |
|           | 01.01 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani                                | 31              | Persentase |              |
|           | 02.01 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan                   | 85              | Persentase |              |
|           | 03.01 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                        | 2,50            | Level      |              |
| 135.05.WA | Program Dukungan Manajemen                                                                                             |                 |            | 315.799.574  |
| SP04      | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum                                                 |                 |            |              |
| 7122      | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual                                             |                 |            | 315.799.574  |
|           | 01.01 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                                       | 100             | Persentase |              |
|           | 02.01 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual                  | 85.1            | Nilai      |              |
|           | 03.01 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                              | 3,38            | Indeks     |              |

KETENTUAN  
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025  
MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE      | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA              | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |             |            |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT   |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
|    |           |                                                        |                            | PEGAWAI       | BARANG      | MODAL      | BANTUAN SOSIAL |                           |            |
| 1  | 2         | 3                                                      | 4                          | 5             | 6           | 7          | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10         |
|    | 135.05.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                  |                            | 0             | 259.057.186 | 22.887.543 | 0              | 281.944.729               | 67.690.364 |
|    | 01        | DKI JAKARTA                                            |                            | 0             | 182.315.189 | 22.887.543 | 0              | 205.202.732               | 67.690.364 |
|    | 692990    | DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL                            | KP                         | 0             | 179.792.013 | 22.887.543 | 0              | 202.679.556               | 67.690.364 |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 179.792.013 | 22.887.543 | 0              | 202.679.556               | 67.690.364 |
|    |           | Target Pendapatan                                      |                            |               |             |            |                | 935.000.000               |            |
|    | 692991    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA | KD                         | 0             | 2.523.176   | 0          | 0              | 2.523.176                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 2.523.176   | 0          | 0              | 2.523.176                 | 0          |
|    | 02        | JAWA BARAT                                             |                            | 0             | 3.478.996   | 0          | 0              | 3.478.996                 | 0          |
|    | 692992    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT            | KD                         | 0             | 3.478.996   | 0          | 0              | 3.478.996                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 3.478.996   | 0          | 0              | 3.478.996                 | 0          |
|    | 03        | JAWA TENGAH                                            |                            | 0             | 2.885.803   | 0          | 0              | 2.885.803                 | 0          |
|    | 692993    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH           | KD                         | 0             | 2.885.803   | 0          | 0              | 2.885.803                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 2.885.803   | 0          | 0              | 2.885.803                 | 0          |
|    | 04        | DI YOGYAKARTA                                          |                            | 0             | 3.170.003   | 0          | 0              | 3.170.003                 | 0          |
|    | 693012    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA        | KD                         | 0             | 3.170.003   | 0          | 0              | 3.170.003                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 3.170.003   | 0          | 0              | 3.170.003                 | 0          |
|    | 05        | JAWA TIMUR                                             |                            | 0             | 3.761.817   | 0          | 0              | 3.761.817                 | 0          |
|    | 692994    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR            | KD                         | 0             | 3.761.817   | 0          | 0              | 3.761.817                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                                   |                            | 0             | 3.761.817   | 0          | 0              | 3.761.817                 | 0          |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 2 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE   | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA         | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |           |       |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT |
|----|--------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------------------|----------|
|    |        |                                                   |                            | PEGAWAI       | BARANG    | MODAL | BANTUAN SOSIAL |                           |          |
| 1  | 2      | 3                                                 | 4                          | 5             | 6         | 7     | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10       |
|    | 06     | ACEH                                              |                            | 0             | 2.210.653 | 0     | 0              | 2.210.653                 | 0        |
|    | 692997 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH             | KD                         | 0             | 2.210.653 | 0     | 0              | 2.210.653                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 2.210.653 | 0     | 0              | 2.210.653                 | 0        |
|    | 07     | SUMATERA UTARA                                    |                            | 0             | 2.612.165 | 0     | 0              | 2.612.165                 | 0        |
|    | 692995 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA   | KD                         | 0             | 2.612.165 | 0     | 0              | 2.612.165                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 2.612.165 | 0     | 0              | 2.612.165                 | 0        |
|    | 08     | SUMATERA BARAT                                    |                            | 0             | 2.263.394 | 0     | 0              | 2.263.394                 | 0        |
|    | 692998 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT   | KD                         | 0             | 2.263.394 | 0     | 0              | 2.263.394                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 2.263.394 | 0     | 0              | 2.263.394                 | 0        |
|    | 09     | RIAU                                              |                            | 0             | 2.223.070 | 0     | 0              | 2.223.070                 | 0        |
|    | 692999 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU             | KD                         | 0             | 2.223.070 | 0     | 0              | 2.223.070                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 2.223.070 | 0     | 0              | 2.223.070                 | 0        |
|    | 10     | JAMBI                                             |                            | 0             | 1.898.164 | 0     | 0              | 1.898.164                 | 0        |
|    | 693010 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI            | KD                         | 0             | 1.898.164 | 0     | 0              | 1.898.164                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 1.898.164 | 0     | 0              | 1.898.164                 | 0        |
|    | 11     | SUMATERA SELATAN                                  |                            | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | 693000 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN | KD                         | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                              |                            | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | 12     | LAMPUNG                                           |                            | 0             | 2.235.138 | 0     | 0              | 2.235.138                 | 0        |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE   | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA           | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |           |       |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT |
|----|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------------------|----------|
|    |        |                                                     |                            | PEGAWAI       | BARANG    | MODAL | BANTUAN SOSIAL |                           |          |
| 1  | 2      | 3                                                   | 4                          | 5             | 6         | 7     | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10       |
|    | 693001 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG            | KD                         | 0             | 2.235.138 | 0     | 0              | 2.235.138                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.235.138 | 0     | 0              | 2.235.138                 | 0        |
|    | 13     | KALIMANTAN BARAT                                    |                            | 0             | 2.200.603 | 0     | 0              | 2.200.603                 | 0        |
|    | 693002 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT   | KD                         | 0             | 2.200.603 | 0     | 0              | 2.200.603                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.200.603 | 0     | 0              | 2.200.603                 | 0        |
|    | 14     | KALIMANTAN TENGAH                                   |                            | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | 693013 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH  | KD                         | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | 15     | KALIMANTAN SELATAN                                  |                            | 0             | 2.533.774 | 0     | 0              | 2.533.774                 | 0        |
|    | 693003 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN | KD                         | 0             | 2.533.774 | 0     | 0              | 2.533.774                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.533.774 | 0     | 0              | 2.533.774                 | 0        |
|    | 16     | KALIMANTAN TIMUR                                    |                            | 0             | 2.083.509 | 0     | 0              | 2.083.509                 | 0        |
|    | 693004 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR   | KD                         | 0             | 2.083.509 | 0     | 0              | 2.083.509                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.083.509 | 0     | 0              | 2.083.509                 | 0        |
|    | 17     | SULAWESI UTARA                                      |                            | 0             | 2.039.167 | 0     | 0              | 2.039.167                 | 0        |
|    | 693005 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA     | KD                         | 0             | 2.039.167 | 0     | 0              | 2.039.167                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                |                            | 0             | 2.039.167 | 0     | 0              | 2.039.167                 | 0        |
|    | 18     | SULAWESI TENGAH                                     |                            | 0             | 2.482.799 | 0     | 0              | 2.482.799                 | 0        |
|    | 693015 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH    | KD                         | 0             | 2.482.799 | 0     | 0              | 2.482.799                 | 0        |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.





DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 4 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE   | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA            | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |           |       |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT |
|----|--------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------------------|----------|
|    |        |                                                      |                            | PEGAWAI       | BARANG    | MODAL | BANTUAN SOSIAL |                           |          |
| 1  | 2      | 3                                                    | 4                          | 5             | 6         | 7     | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10       |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.482.799 | 0     | 0              | 2.482.799                 | 0        |
|    | 19     | SULAWESI SELATAN                                     |                            | 0             | 2.759.378 | 0     | 0              | 2.759.378                 | 0        |
|    | 692996 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN    | KD                         | 0             | 2.759.378 | 0     | 0              | 2.759.378                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.759.378 | 0     | 0              | 2.759.378                 | 0        |
|    | 20     | SULAWESI TENGGARA                                    |                            | 0             | 2.255.508 | 0     | 0              | 2.255.508                 | 0        |
|    | 693014 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA   | KD                         | 0             | 2.255.508 | 0     | 0              | 2.255.508                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.255.508 | 0     | 0              | 2.255.508                 | 0        |
|    | 21     | MALUKU                                               |                            | 0             | 1.933.121 | 0     | 0              | 1.933.121                 | 0        |
|    | 693008 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU              | KD                         | 0             | 1.933.121 | 0     | 0              | 1.933.121                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 1.933.121 | 0     | 0              | 1.933.121                 | 0        |
|    | 22     | BALI                                                 |                            | 0             | 2.869.706 | 0     | 0              | 2.869.706                 | 0        |
|    | 693006 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI                | KD                         | 0             | 2.869.706 | 0     | 0              | 2.869.706                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.869.706 | 0     | 0              | 2.869.706                 | 0        |
|    | 23     | NUSA TENGGARA BARAT                                  |                            | 0             | 2.262.043 | 0     | 0              | 2.262.043                 | 0        |
|    | 693016 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT | KD                         | 0             | 2.262.043 | 0     | 0              | 2.262.043                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.262.043 | 0     | 0              | 2.262.043                 | 0        |
|    | 24     | NUSA TENGGARA TIMUR                                  |                            | 0             | 2.190.553 | 0     | 0              | 2.190.553                 | 0        |
|    | 693007 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR | KD                         | 0             | 2.190.553 | 0     | 0              | 2.190.553                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                 |                            | 0             | 2.190.553 | 0     | 0              | 2.190.553                 | 0        |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 5 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE   | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA                  | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |           |       |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT |
|----|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------------------|----------|
|    |        |                                                            |                            | PEGAWAI       | BARANG    | MODAL | BANTUAN SOSIAL |                           |          |
| 1  | 2      | 3                                                          | 4                          | 5             | 6         | 7     | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10       |
|    | 25     | PAPUA                                                      |                            | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | 693009 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA                     | KD                         | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 2.160.402 | 0     | 0              | 2.160.402                 | 0        |
|    | 26     | BENGKULU                                                   |                            | 0             | 2.364.206 | 0     | 0              | 2.364.206                 | 0        |
|    | 693011 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU                  | KD                         | 0             | 2.364.206 | 0     | 0              | 2.364.206                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 2.364.206 | 0     | 0              | 2.364.206                 | 0        |
|    | 28     | MALUKU UTARA                                               |                            | 0             | 2.184.114 | 0     | 0              | 2.184.114                 | 0        |
|    | 693020 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA              | KD                         | 0             | 2.184.114 | 0     | 0              | 2.184.114                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 2.184.114 | 0     | 0              | 2.184.114                 | 0        |
|    | 29     | BANTEN                                                     |                            | 0             | 2.687.370 | 0     | 0              | 2.687.370                 | 0        |
|    | 693017 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN                    | KD                         | 0             | 2.687.370 | 0     | 0              | 2.687.370                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 2.687.370 | 0     | 0              | 2.687.370                 | 0        |
|    | 30     | KEP. BANGKA BELITUNG                                       |                            | 0             | 1.991.041 | 0     | 0              | 1.991.041                 | 0        |
|    | 693018 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KD                         | 0             | 1.991.041 | 0     | 0              | 1.991.041                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 1.991.041 | 0     | 0              | 1.991.041                 | 0        |
|    | 31     | GORONTALO                                                  |                            | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | 693019 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO                 | KD                         | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | D00    | PNBP                                                       |                            | 0             | 2.180.503 | 0     | 0              | 2.180.503                 | 0        |
|    | 32     | KEPULAUAN RIAU                                             |                            | 0             | 2.190.553 | 0     | 0              | 2.190.553                 | 0        |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026



DS:0139-4961-8213-6723

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 6 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE      | PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA       | KP<br>KD<br>DK<br>TP<br>UB | JENIS BELANJA |             |            |                | PAGU/TARGET<br>PENDAPATAN | TERCATAT   |
|----|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
|    |           |                                                 |                            | PEGAWAI       | BARANG      | MODAL      | BANTUAN SOSIAL |                           |            |
| 1  | 2         | 3                                               | 4                          | 5             | 6           | 7          | 8              | 9=5+6+7+8                 | 10         |
|    | 693022    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU | KD                         | 0             | 2.190.553   | 0          | 0              | 2.190.553                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                            |                            | 0             | 2.190.553   | 0          | 0              | 2.190.553                 | 0          |
|    | 33        | PAPUA BARAT                                     |                            | 0             | 2.200.603   | 0          | 0              | 2.200.603                 | 0          |
|    | 693021    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT    | KD                         | 0             | 2.200.603   | 0          | 0              | 2.200.603                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                            |                            | 0             | 2.200.603   | 0          | 0              | 2.200.603                 | 0          |
|    | 34        | SULAWESI BARAT                                  |                            | 0             | 2.092.936   | 0          | 0              | 2.092.936                 | 0          |
|    | 693023    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT | KD                         | 0             | 2.092.936   | 0          | 0              | 2.092.936                 | 0          |
|    | D00       | PNBP                                            |                            | 0             | 2.092.936   | 0          | 0              | 2.092.936                 | 0          |
|    | 135.05.WA | Program Dukungan Manajemen                      | KP                         | 87.078.596    | 209.308.493 | 19.412.485 | 0              | 315.799.574               | 8.296.590  |
|    | 01        | DKI JAKARTA                                     |                            | 87.078.596    | 209.308.493 | 19.412.485 | 0              | 315.799.574               | 8.296.590  |
|    | 692990    | DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL                     |                            | 87.078.596    | 209.308.493 | 19.412.485 | 0              | 315.799.574               | 8.296.590  |
|    | A00       | RM                                              |                            | 87.078.596    | 32.199.723  | 0          | 0              | 119.278.319               | 0          |
|    | D00       | PNBP                                            |                            | 0             | 177.108.770 | 19.412.485 | 0              | 196.521.255               | 8.296.590  |
|    |           | TOTAL                                           |                            | 87.078.596    | 468.365.679 | 42.300.028 | 0              | 597.744.303               | 75.986.954 |
|    |           | RM                                              |                            | 87.078.596    | 32.199.723  | 0          | 0              | 119.278.319               | 0          |
|    |           | PNBP                                            |                            | 0             | 436.165.956 | 42.300.028 | 0              | 478.465.984               | 75.986.954 |
|    |           | PENDAPATAN                                      |                            |               |             |            |                | 935.000.000               |            |

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025  
MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-135.05-0/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0139-4961-8213-6723

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
3. PAGU : Rp.597.744.303.000  
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE      | URAIAN PROGRAM                        | PAGU        | JANUARI    | PEBRUARI   | MARET      | APRIL      | MEI        | JUNI       | JULI       | AGUSTUS    | SEPTEMBER  | OKTOBER    | NOPEMBER   | DESEMBER   |
|----|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 135.05.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    |           | RENCANA PENARIKAN DANA                | 281.944.729 | 6.893.383  | 17.946.747 | 31.063.267 | 28.431.573 | 26.753.311 | 27.706.765 | 29.452.751 | 30.352.897 | 23.932.426 | 24.267.591 | 23.479.200 | 11.664.820 |
|    |           | PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN         | 935.000.000 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.685 |
| 2  | 135.05.WA | Program Dukungan Manajemen            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    |           | RENCANA PENARIKAN DANA                | 315.799.574 | 23.609.481 | 25.648.088 | 31.733.136 | 27.730.218 | 26.765.948 | 27.221.076 | 26.712.646 | 26.945.797 | 26.653.681 | 25.418.754 | 24.289.830 | 23.070.918 |
|    |           | TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA          | 597.744.303 | 30.502.864 | 43.594.834 | 62.796.403 | 56.161.791 | 53.519.259 | 54.927.841 | 56.165.397 | 57.298.693 | 50.586.107 | 49.686.345 | 47.769.030 | 34.735.739 |
|    |           | TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN   | 935.000.000 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.665 | 77.916.685 |

Jakarta, 01 Desember 2025  
MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS